



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

DUGAAN KETERLIBATAN PETINGGI POLRI DALAM KASUS TAMBANG ILEGAL

Noverdi Puja Saputra
Analisis Legislatif Ahli Pertama
noverdi.saputra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Mantan Kepala Biro (Karo) Pengamanan Internal (Paminal) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Hendra Kurniawan mengaku pernah menyelidiki dugaan setoran tambang ilegal yang melibatkan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto dan sejumlah petinggi di Markas Besar (Mabes) Polri lainnya. Hendra mengungkapkan kesimpulan dari hasil penyidikan tersebut terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh sejumlah pejabat di Polri dengan para pengusaha tambang ilegal di Kalimantan yang tertuang dalam Laporan Hasil Penyidikan (LHP). Hendra membenarkan dan kejadian itu telah sesuai dengan fakta. Menurutnya, semua aliran uang yang diberikan terdapat bukti-buktinya dan ada di dalam LHP. LHP tersebut juga telah diketahui oleh mantan Kepala Divisi (Kadiv) Propam Polri, Ferdy Sambo.

Keberadaan LHP tersebut juga telah dibenarkan oleh Ferdy Sambo usai menjalani sidang pembunuhan Brigadir Joshua pada 22 November 2022. Sambo mengatakan bahwa surat tersebut memang ada, dan meminta agar para pewarta untuk menanyakan tentang keberadaan dan kelanjutan dari LHP tersebut kepada pejabat yang berwenang di Mabes Polri. Menurut Sambo, ia pernah menandatangani surat LHP yang terdaftar dengan Nomor: R/1253/WAS.2.4/2022/IV/DIVPROPAM, tanggal 7 April 2022 yang bersifat rahasia. Surat itu juga telah ditembuskan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam dokumen tersebut, pada poin h, tertulis Aiptu Ismail Bolong memberikan uang koordinasi ke Bareskrim Polri yang diserahkan kepada salah satu perwira menengah Subdit V Dittipidter sebanyak 3 kali, yaitu bulan Oktober, November, dan Desember 2021 sebesar Rp3 miliar setiap bulan untuk dibagikan di Dittipidter Bareskrim. Selain itu, ia juga memberikan uang koordinasi kepada Kabareskrim secara langsung di ruang kerja Kabareskrim dalam bentuk USD sebanyak 3 kali, yaitu bulan Oktober, November, dan Desember 2021, sebesar Rp2 miliar. Kesimpulan dari LHP ditemukan fakta bahwa di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur, terdapat beberapa penambangan batu bara ilegal yang tidak dilengkapi izin usaha penambangan (IUP). Namun hal tersebut tidak dilakukan upaya hukum oleh kepolisian karena adanya uang koordinasi dari para pengusaha tambang ilegal tersebut dan kedekatan dengan para pejabat Polda Kalimantan Timur.

Isu setoran ini sebelumnya disampaikan oleh mantan anggota Polres Samarinda bernama Ismail Bolong. Ismail sempat menjalani pemeriksaan oleh Karo Paminal pada Februari 2022. Selain itu, Ismail juga membuat video di media sosial. Isi video tersebut berupa pengakuan bahwa ia melakukan pengepulan dan penjualan batu bara ilegal tanpa IUP dengan keuntungan Rp5 – 10 miliar setiap bulannya. Kemudian ia mengklaim telah melakukan koordinasi dengan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto yakni memberikan uang sebanyak tiga kali. Namun, tiba-tiba Ismail membantah pernyataan pada video tersebut melalui video lainnya. Ia mengklarifikasi dan meminta permohonan maaf kepada Komjen Agus Andrianto atas berita yang beredar dan menyatakan bahwa berita yang ia sebar sebelumnya tidak benar. Ismail mengaku ada perwira tinggi Polri yang menekannya untuk membuat video terkait pengakuan pemberian uang terhadap Komjen Agus Andrianto.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Santoso meminta dugaan keterlibatan Kabareskrim dan sejumlah pejabat di Polri dalam kasus tambang ilegal harus segera ditindaklanjuti. Sudah seharusnya Kapolri menindak tegas dan menyelesaikan permasalahan anggotanya yang menyimpang. Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh terhadap oknum-oknum anggota Polri yang terindikasi menerima aliran dana tambang ilegal selama ini.

Atensi DPR

Saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri masih rendah akibat adanya beberapa kasus yang menimpa para petinggi Polri. Muncul anggapan di masyarakat sedang terjadi “perang bintang” di institusi Polri, karena saling bongkar tindak pidana yang dilakukan oleh para perwira Polri. Keseriusan dan komitmen Kapolri untuk menyelesaikan permasalahan internal di institusi Polri akan ditunggu dan menjadi perhatian publik.

Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, perlu melakukan Rapat Kerja dengan Polri dan PPATK. Komisi III dapat meminta Kapolri untuk membentuk Tim Khusus yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Kapolri untuk melakukan penyelidikan terhadap permasalahan ini. Komisi III juga dapat meminta PPATK untuk melacak aliran dana yang disangkakan tersebut. Koordinasi antara Polri dan PPATK harus berjalan dengan baik tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Hasil kerja tersebut perlu dilaporkan ke Komisi III DPR RI sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI.

Sumber

Media Indonesia, 25 November 2022;
msn.com, 28 November 2022;
Republika, 25 November 2022;
tribunnews.com, 28 November 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Rasbin
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.